



Rawat Inap Asal-asalan Tuding Pembangunan Gedung

Bangli (Bali Post) -

Pembangunan gedung rawat inap RSUD Bangli dinilai asal-asalan. Peralnya, tembok bangunan nampak bergelombang. Demikian terungkap saat Komisi III DPRD Bangli melakukan inspeksi mendadak (Sidak), Rabu (18/11) kemarin.

Sidak yang dimulai 09.30 Wita ini dipimpin Ketua Komisi III Ni Nengah Madya Yani dan diikuti beberapa anggota. Saat tiba di lokasi, yang pertama menjadi perhatian, yakni bahan bangunan. Batu bata yang menjadi komponen penting, kualitasnya langsung dicek. Anggota Komisi III, I Dewa Gede Oka menuding pengerjaan gedung di sisi paling utara yang menelan anggaran Rp 1 miliar, asal-asalan. Hal ini terlihat dari tembok bangunan yang bergelombang.

Menurutnya, sebagai bangunan yang nantinya ditujukan untuk publik, pembangunan ini harus benar-benar dilakukan dengan baik. "Itu bangunan temboknya seperti ular. Terlihat bergelombang. Begitu juga dengan lisplangnya. Jangan asal-asalan gitu," ujarnya geram.

Hal senada juga diungkapkan Madya Yani. Pembangunan yang menelan anggaran cukup tinggi itu seharusnya diimbangi dengan

hasil yang maksimal. Dikatakan, meskipun yang cacat pada temboknya, tetapi itu akan berpengaruh terhadap pekerjaan pelaksana proyek selanjutnya. "Kasian anggaran pembangunan besar, kalau bangunannya kurang maksimal. Ini harus disikapi secara serius," sebutnya.

Dikatakan kurang maksimalnya pembangunan ini sudah disampaikan ke pelaksana proyek dan diminta untuk segera melakukan perbaikan. Sementara itu, terkait dengan bahan bangunan, dewan asal Lingkungan Pule Kelurahan Kawan ini menyebutkan sudah sesuai standar. "Bahan bangunan tidak ada masalah," katanya.

Terkait sisa waktu pengerjaan, kata Madya Yani masih tinggal satu bulan. Sementara *finishing* bangunannya masih banyak yang belum dilakukan. "Kami harap bisa selesai tepat waktu," ucapnya. Pembantu pelaksana proyek, Made Sutra Wijaya menjelaskan pengerjaan proyek

Edisi : Kamis, 19 Nov 2015

Hal : 18



Bali Post/sos

SIDAK - Komisi III DPRD Bangli sidak bangunan RSUD Bangli. Saat itu ditemukan tembok bangunan bergelombang.

ini dimulai 11 Agustus dan rampung 8 Desember. Pengerjaannya pun sudah mencapai 75 persen. Ia optimis bisa selesai tepat waktu.

“Kami optimis bangunan ini selesai tepat waktu,” pungkaskannya. Selain bangunan rawat inap, DPRD juga menyidak pembangunan gedung ponek. Saat itu, hal yang menjadi sorotan, yakni waktu pelaksanaan proyek yang tinggal

lagi satu bulan. Sementara pekerjaan masih banyak yang belum terselesaikan. Hal ini pun menimbulkan keraguan dari dewan, salah satunya anggota Komisi III I Wayan Subagan. “Saya kurang yakin bangunan ini bisa rampung satu bulan lagi. Masih banyak yang belum selesai,” katanya.

Menyikapi sorotan dewan ini, kepala pelaksana proyek

Wayan Arianta mengatakan pengerjaan bangunan yang dimulai pada awal Oktober ini sudah mencapai 55 persen. Untuk bisa selesai tepat waktu, ia pun memberlakukan sistem lembur dan menambah jumlah buruh. “Di sisa waktu ini kami gunakan sistem lembur. Jumlah tenaga pun kami tambah. Agar bisa rampung pertengahan Desember,” katanya. (kmb45)

Edisi : Kamis, 19 Nov 2015

Hal : 18



**PETIKAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 178/K/X-X.3/05/2013**

TENTANG

**PEMINDAHAN TEMPAT TUGAS PARA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : dst.
Mengingat : dst.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pegawai Negeri Sipil nomor urut : 196
Nama : Anak Agung Leli Kusuma Dewi, S.E.
NIP : 197106161999032003
Pangkat / Golongan : Penata Tk. I / III/d
Jabatan : Pemeriksa
Unit Kerja Lama : BPK RI Perwakilan Provinsi Bali
dipindahtugaskan ke
Unit Kerja Baru : BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat
- KEDUA** : Penempatan para Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam DIKTUM PERTAMA pada tingkat unit kerja Eselon III.A atau Eselon IV.A diatur lebih lanjut oleh Kepala Unit Kerja/Kepala Perwakilan dan tembusannya disampaikan kepada Biro Sumber Daya Manusia paling lambat 30 hari sejak salinan/petikan Keputusan ini disampaikan.
- KETIGA** : Biaya yang berhubungan dengan pemindahan tempat tugas tersebut dibebankan kepada Anggaran Belanja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Petikan Asli Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 24 Mei 2013

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL
ttd.

Hendar Ristriawan, S.H., M.H.
NIP 195803211978021001

Sesuai dengan Keputusan tersebut
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
KEPALA BIRO SDM



Mataram,4 September 2015

Kepada Yth,
Sekretaris Jendral BPK RI
Di Jakarta

Dengan hormat,

Melalui surat ini,saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A A Leli Kusuma Dewi
NIP : 197106161999032003
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan : Pemeriksa (T)
Unit Kerja : Staf Sub Bagian Humas dan TU Kepala Perwakilan

Bermaksud untuk mengajukan permohonan pindah ke unit kerja **Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali** dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jendral Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 366 /K/X-XIII.2/9/2010 tentang Pemindahan Pegawai Non Struktural pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 6 ayat 2 yang berbunyi :
“ Pegawai Wanita yang suami bukan merupakan pegawai BPK dapat mengajukan permohonan pindah untuk mengikuti suami, selama memenuhi persyaratan berikut :
 - a. Memiliki masa kerja di unit kerja terakhir paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - b. Melampirkan dengan bukti dokumen berupa salinan surat kartu keluarga ; dan
 - c. Selama bekerja di lingkungan pelaksana BPK belum pernah dipindahkan atas permohonan sendiri sebanyak 2 (dua) kali.”

Berdasarkan hal tersebut saya sampaikan bahwa masa kerja saya di unit kerja terakhir (**BPK Perwakilan NTB**) sudah 2 tahun dan belum pernah dipindah tugaskan atas permohonan sendiri.

2. Saya di Perwakilan NTB ini ditempatkan sebagai pegawai penunjang pada Sub Bagian Humas dan TU Kalan, sudah 2 tahun lebih saya ditempatkan di Perwakilan NTB,pada awal penempatan di Perwakilan NTB sekitar bulan Oktober 2014 saya mengalami kecelakaan,yang mengakibatkan kaki saya patah,jadi sampai sekarang pun kaki saya masih belum nyaman jika dipakai berjalan jauh, untuk berkumpul dengan keluarga, dimana saya saat ini setiap minggu saya harus bolak balik ke Bali karena memiliki anak semata wayang yang masih balita berumur 4 tahun, yang masih sangat membutuhkan perhatian saya.Meskipun biaya yang saya keluarkan untuk bolak balik ke Bali cukup besar setiap bulannya tapi demi bisa berkumpul dengan anak ,saya ikhlas pak.Sebagai seorang ibu, saya merasa tidak bertanggungjawab atas pertumbuhan dan perkembangan anak saya yang pada waktu itu masih berumur 2 tahun,karena harus bekerja jauh dari keluarga.Dapat berkumpul dengan keluarga merupakan hal yang sangat berarti, selain memberikan ketenangan kepada saya dalam hal menjalankan tugas baik tugas sebagai pegawai

pada pelaksana BPK RI, maupun tugas saya sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anak saya. Tuhan menganugraahkan anak kepada saya setelah berumur 40 tahun, tapi saya tinggalkan untuk bekerja di Mataram, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati saya bermaksud untuk mengajukan permohonan pindah tugas ke **Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali atas biaya sendiri.**

Besar harapan saya agar Bapak dapat memberikan persetujuan pindah dengan alasan tersebut. Bersama ini saya lampirkan foto copy kartu keluarga, surat dokter, KTP.

Demikian permohonan saya, atas perhatian dan kebijakan serta perkenan Bapak, saya mengucapkan banyak terima kasih.

Mengetahui
Kepala Perwakilan



 **Eldy Mustafa, S.H., M.H**
NIP 195609181986021001

Yang Mengajukan,



A. A Leli Kusuma Dewi
NIP 197106161999032003

Tembusan Yth:
Kepala Biro SDM BPK RI Jakarta